



Pemkot Yogya Perbaiki 61 Rumah Tidak Layak Huni

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan dana APBD secara bertahap setiap tahun. Pada tahun 2025 perbaikan RTLH menggunakan APBD Kota Yogyakarta menasar 61 rumah. Sampai kini sebagian RTLH itu sudah selesai diperbaiki dan sebagian lainnya dalam proses perbaikan hingga mendekati akhir tahun.

Kepala Bidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan mengatakan perbaikan RTLH itu berasal dari data RTLH yang tersebar di Kota Yogyakarta. Perbaikan RTLH meliputi rusak berat, sedang dan ringan.

Setiap tahun ada perbaikan rumah tidak layak huni yang tersebar dan secara bertahap. Penataan permukiman dengan pembangunan

rumahnya juga bertahap," kata Sigit dalam keterangannya di Yogya, Senin (28/7). Salah satu perbaikan RTLH yang menggunakan APBD Kota Yogyakarta 2025 adalah paket pekerjaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan kondisi rusak berat sebanyak 5 unit. Perbaikan RTLH itu tersebar di Kelurahan Karangwaru, Gedongkwo, Keparak dan Krcak dengan pagu anggaran sekitar Rp 175 juta. Kini perbaikan RTLH

tersebut dalam proses pelaksanaan. "Kalau yang rusak berat, kerusakan di struktur atap dan struktur bangunan. Rusak ringan dan sedang lebih ke penutup atap dan dinding," ujarnya.

Dia menyatakan salah satu kriteria RTLH dapat diperbaiki menggunakan APBD adalah ada kejelasan terkait alas hak tanah. Misalnya ada sertifikat hak milik (SHM) maupun surat kekancingan dari keraton terkait pemanfaatan lahan. Sigit mengaku

sebenarnya warga yang statusnya menempati lahan orang atau ngindung, diperbolehkan asalkan diizinkan pemilik tanah. "Kami fokus ke rumah terdampak penataan yang dampaknya lebih besar ke perbaikan sarpras perumahan dan pemukiman. Target perbaikan rumah tidak layak huni menggu-

nakan APBD selesai pada Oktober," terang Sigit.

Perbaikan RTLH dengan APBD Kota Yogyakarta juga melibatkan TNI melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga mengencarkan perbaikan RTLH di luar dana APBD yaitu menggunakan

dana CSR dan gotong royong masyarakat. Sigit menyampaikan pada akhir tahun nanti akan melakukan inventarisasi data perbaikan RTLH dengan CSR dan gotong royong masyarakat yang digencarkan wali kota itu apakah masuk data RTLH di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta atau tidak. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005